

PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT BERBAHAYA

(DAFTAR G) JENIS *CARNOPHEN*

(Studi di Kabupaten Tuban)

JURNAL ILMIAH

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

MOHAMMAD ALEK TABRANI

NIM. 105010102111004



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2014

Penyebab terjadinya tindak pidana peredaran obat berbahaya (daftar G) jenis *Carnophen*
(Studi di Kabupaten Tuban)

MOHAMMAD ALEK TABRANI, Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya,
Agustus 2014, email: permatavalentino@yahoo.com

Abstrak

Dalam penulisan skripsi ini akan dibahas tentang penyebab terjadinya tindak pidana peredaran obat berbahaya (daftar G) jenis *Carnophen*.

Permasalahan yang terjadi di kabupaten Tuban, bahwa upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak Polres Tuban terkait peredaran obat berbahaya (daftar G) sudah maksimal, akan tetapi masih ditemukan peredaran obat berbahaya (daftar G) jenis *Carnophen* di lapangan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa apa yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana peredaran obat berbahaya (daftar G) jenis *Carnophen* di kabupaten Tuban.

Dalam penulisan skripsi ini metode penelitian hukum yang digunakan adalah pendekatan yuridis kriminologis. Yuridis yaitu meninjau masalah yang diteliti dari segi ilmu hukum dan dengan melihat keterkaitan antara kenyataan dan implementasinya yang bertujuan untuk mendeskripsikan kegiatan atau peristiwa alamiah dalam praktik sehari-hari. Pendekatan yuridis dimaksudkan untuk mengkaji permasalahan dari segi hukumnya. Sedangkan pendekatan kriminologis digunakan untuk mendeskripsikan realita dan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana di lapangan.

Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana peredaran obat berbahaya (daftar G) jenis *Carnophen* yaitu faktor dari sisi pengedar dan faktor dari sisi pengguna.

Terdapat dua kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak pidana peredaran obat berbahaya (daftar G) jenis *Carnophen*, yaitu kurangnya bukti untuk dilakukan penangkapan dan kurangnya laporan dari masyarakat.

Terdapat dua upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Tuban terkait tindak pidana peredaran obat berbahaya (daftar G) jenis *Carnophen*, yaitu dengan pencegahan dan penindakan.

Kata kunci : Tindak Pidana, Peredaran, Obat (Daftar G) Jenis *Carnophen*

A. Latar Belakang

Istilah “penyalahgunaan obat” (*drug abuse*) sebenarnya kurang tepat oleh karena istilah tersebut mengandung arti berbeda bagi setiap orang. Ada hal yang membedakan arti istilah penyalahgunaan obat dari “penggunaan secara salah pada obat” (*drug misuse*). Penyalahgunaan obat cenderung ditafsirkan sebagai penggunaan obat dengan tujuan non medis, biasanya untuk mengubah kesadaran. Sedangkan penggunaan secara salah pada obat cenderung pada arti kesalahan indikasi, kesalahan dosis atau penggunaan yang terlalu lama.¹

Ketergantungan merupakan fenomena biologi yang sering dikaitkan dengan “penyalahgunaan obat”. Ketergantungan psikologis dimanifestasikan oleh dorongan perilaku abnormal dimana individu menggunakan obat secara berulang kali untuk kepuasan pribadi yang seringkali dihadapkan pada resiko kesehatan. Ketergantungan psikologis terjadi ketika penggunaan ulang obat menghasilkan *withdrawl efect* (efek putus obat). Hal ini menunjukkan bahwa tubuh menyesuaikan untuk tingkat homeostasis baru selama penggunaan obat yang memperlihatkan reaksi yang berlawanan ketika keseimbangan yang baru terganggu.²

Pengertian Obat itu sendiri adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia, hal ini diperjelas di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Peredaran obat-obatan diatur secara eksplisit didalam pasal 197 jo pasal 98 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan.

Pada pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan menyatakan sebagai berikut: setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dengan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Kemudian pasal 98 ayat 2

¹ Bertram G. Katzung, **Farmakologi Dasar dan Klinik**, Salemba Medika, Jakarta, 2002, hal 327

² *Ibid*, hal 328

menyatakan sebagai berikut : Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat. Dari dua ketentuan diatas, ditegaskan bahwa orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dikenakan pidana penjara dan denda.

Meskipun peredaran obat-obatan telah diatur secara tegas di dalam Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 dan ada ancaman pidananya bagi pelanggar, namun faktanya peredaran obat-obatan berbahaya masih terjadi di kota-kota besar. Beberapa contoh kasus peredaran obat-obatan berbahaya di kota-kota besar sebagai berikut: di Semarang, Petugas Polrestabes Semarang menangkap seorang tersangka pengedar pil koplo, Danu Sasongko, 21, di sebuah warung hik di Semarang. Dari tangan tersangka disita sebanyak 10.560 butir pil *Trihexyphenidyl*. Pil yang tergolong dalam (daftar G) ini dikenal dengan sebutan pil koplo *Trihex*. Tersangka ditangkap pada sekitar pukul 22.00 WIB, Kamis (3/10/2013).³

Peredaran obat-obatan berbahaya tidak hanya dijumpai di Kabupaten atau kota-kota besar saja, akan tetapi juga dijumpai di kota kecil, salah satu contohnya adalah kota Tuban tepatnya di Kabupaten Tuban. Di Kabupaten Tuban telah beredar salah satu jenis obat berbahaya (daftar G), yaitu *Carnophen*. Di Kabupaten Tuban, Jajaran Satreskoba Polres Tuban berhasil membekuk pengedar *Carnophen*. Kali ini adalah Aris Nurcahyo (20), warga Trunojoyo, Gg sadar, kelurahan kingking, kecamatan kota, kabupaten Tuban, Sabtu (26/05/2012), 17.00 WIB. Saat di tangkap di jalan Trunojoyo depan rumahnya, pelaku kedapatan sedang mengedarkan obat berbahaya (Daftar G) yang seharusnya menggunakan resep dokter dalam pembeliannya ini. Dari penangkapan ini petugas berhasil mengamankan pelaku yang juga seorang karyawan pabrik di Tuban ini, beserta barang bukti berupa 15 butir pil *Carnophen* dan uang tunai hasil penjualan *Carnophen* sebesar Rp. 220.000. Saat dikonfirmasi seputartuban.com, Kasat Reskoba, AKP Gatot Subagyo menjelaskan bahwa, penangkapan ini berawal dari laporan warga yang melihat adanya transaksi *Carnophen* setiap hari. “Setelah kami

³Ahmad Mufid Aryono, 2013, **Polisi Sita 10.560 Butir Pil Koplo Trihek** (online), <http://www.solopos.com/> (21 April 2014)

mendapatkan laporan warga, selanjutnya kami lakukan pengintaian, akhirnya setelah ada bukti baru kami adakan penangkapan”, tegasnya.⁴

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana peredaran obat berbahaya (daftar G) jenis *Carnophen* di Kabupaten Tuban ?
2. Bagaimana upaya pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana peredaran obat berbahaya (daftar G) jenis *Carnophen* di Kabupaten Tuban?

C. Pembahasan

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian dengan pendekatan empiris. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan empiris ialah sebagai suatu usaha mendekati masalah dengan pengetahuan tentang teknik-teknik yang diteliti dengan sifat hukum yang digunakan untuk mendapatkan kebenaran di masyarakat agar tercapai sasarnya.⁵ Dalam penelitian ini, pendekatan tersebut digunakan untuk mengumpulkan kevalidan data dan mencari fakta-fakta yang terjadi di masyarakat. Terkait pada masalah pokok, mengenai upaya pihak kepolisian di lapangan dalam menanggulangi tindak pidana peredaran obat berbahaya (daftar G) jenis *Carnophen*.

Dalam melaksanakan penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis kriminologis. Yuridis yaitu meninjau masalah yang diteliti dari segi ilmu hukum dan dengan melihat keterkaitan antara kenyataan dan implementasinya yang bertujuan untuk mendeskripsikan kegiatan atau peristiwa alamiah dalam praktik sehari-hari.⁶ Pendekatan yuridis dimaksudkan untuk mengkaji permasalahan dari segi hukumnya, yaitu tentang aturan-aturan yang berkaitan dengan peredaran obat berbahaya (daftar G) jenis *Carnophen*, sedangkan pendekatan kriminologis digunakan untuk mendeskripsikan realita dan faktor-

⁴Hanafi, 2012, **Mengedarkan *Carnophen* Seorang Karyawan Ditangkap** (online)
<http://seputartuban.com/> (21 April 2014)

⁵ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**. cet3, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1986, hal 8

⁶ Soemitro, **Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hal 65

faktor penyebab terjadinya tindak pidana peredaran obat berbahaya (daftar G) jenis *Carnophen* di lapangan.⁷

Jenis data yang digunakan Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari lapangan.⁸ Data primer yang dimaksud adalah berupa hasil dari penelitian di Polres Kabupaten Tuban terutama terkait dengan masalah pokok. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan yang meliputi buku, majalah, data arsip, data resmi dari instansi yang digunakan sebagai tempat penelitian.⁹

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada yang diwawancarai, jenis atau bentuk wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang difokuskan (*focused interview*), maksudnya adalah wawancara dimana yang diwawancarai mempunyai pengalaman-pengalaman dengan melakukan tingkah laku yang dilakukan menjadi obyek penelitian.¹⁰ Wawancara yang pertama dilakukan di Polres kabupaten Tuban, tepatnya dibagian satresnarkoba. Wawancara dilakukan dengan cara bertatap muka langsung dengan menanyakan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan hal pokok tentang faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana peredaran obat berbahaya (daftar G) jenis *Carnophen* dan upaya menanggulangi tindak pidana peredaran obat berbahaya (daftar G) jenis *Carnophen*. Wawancara yang kedua dilakukan di rumah pengedar obat berbahaya (daftar G) jenis *Carnophen* dengan menanyakan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan hal pokok tentang faktor-faktor yang menyebabkan responden (pengedar) menjadi pengedar obat berbahaya (daftar G) jenis *Carnophen*.

Kuesioner adalah menyebarkan daftar pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian kepada 20 orang pengguna obat berbahaya (daftar G) jenis *Carnophen*. Kuesioner tersebut dibagikan kepada 20 orang pengguna obat berbahaya (daftar G) jenis *Carnophen* yang berada di wilayah kabupaten Tuban. Kuesioner tersebut berisikan 10 pertanyaan yang berkaitan dengan hal pokok yaitu

⁷ Soerdjono Dirjosisworo, **Kriminologi Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal 26

⁸ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hal 10

⁹ M. Iqbal Hasan, **Metode Penelitian dan Aplikasinya**, Remaja Karya, Bandung, 1999, hal 35

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum cet 4**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal 51

tentang faktor-faktor yang menyebabkan responden (pengguna) menjadi pengguna obat berbahaya (daftar G) jenis *Carnophen*.

Peredaran pil *Carnophen* ini pada umumnya dilakukan disebuah kampung yang lokasinya tidak jauh dari alun-alun kota Tuban. Didalam kampung tersebut terdapat 5 (lima) pengedar yang mengedarkan pil *Carnophen* setiap harinya. Lima pengedar tersebut mengedarkan pil *Carnophen* di rumahnya masing-masing, atau lebih tepatnya didepan teras rumahnya dengan berkedok sebuah warung yang menjual makanan ringan atau snack. Pada saat mengedarkan pil *Carnophen*, pengedar secara terang-terangan dalam menjalankan aksinya. Sambil menunggu pelanggan datang, pengedar hanya duduk didepan teras rumah masing-masing sambil membawa sebuah kaleng atau kantong plastik yang berisi ratusan butir pil *Carnophen*. Para pengedar pil *Carnophen* tersebut sudah mempunyai pelanggan masing-masing dan masing-masing pengedar tidak berebut pelanggan.

Dalam mengedarkan pil *Carnophen* para pengedar pasti memiliki suatu rancangan modus operandi dalam melakukan aksi mengedarkan pil *Carnophen* agar tidak diketahui oleh pihak Kepolisian. Pada saat penulis melakukan observasi atau pengamatan dilapangan, penulis dapat menyimpulkan bahwa terdapat beberapa modus operandi yang biasanya dilakukan oleh pengedar dalam mengedarkan pil *Carnophen*, antara lain : ¹¹

1. Untuk mengelabui petugas kepolisian, para pengedar tersebut mengedarkan pil *Carnophen* di depan rumahnya masing-masing dengan berkedok warung yang menjual makanan ringan/snack.
2. Para pengedar Mengedarkan pil *Carnophen* dengan dibantu oleh beberapa orang karyawan. Salah satu Karyawan bertugas membawa dan menjual ratusan pil *Carnophen* yang ditempatkan pada sebuah kaleng atau kantong plastik, dan karyawan yang lainnya bertugas menerima uang hasil penjualan pil *Carnophen*.
3. Apabila ada pembeli yang akan membeli pil *Carnophen* diatas 100 butir, maka pengedar menggunakan sistem delivery order. Pembeli hanya mengirimkan pesan sms kepada pengedar dengan kesepakatan jumlah pil *Carnophen*, tempat dan waktu bertemu.

¹¹ Hasil survey Penulis Pada Tanggal 8 Juni 2014 sampai dengan 13 Juli 2014.

4. Apabila petugas melakukan razia, pada saat itu juga rumah dari pengedar tersebut ditutup oleh pemiliknya, dan pengedar/pemilik rumah mengkosongkan rumah tersebut dengan cara pemilik rumah pergi keluar rumah. Dengan demikian petugas tidak dapat masuk ke rumah pengedar untuk melakukan pemeriksaan.
5. Alat-alat yang digunakan pengedar pil *Carnophen* untuk melangsungkan aksinya di depan rumah yaitu menggunakan kursi panjang untuk berjualan pil *Carnophen*. Kursi panjang tersebut cukup untuk ditempati dua orang, hal ini dikarenakan pengedar dalam setiap aksinya dibantu oleh 1 orang karyawan. Alat lainnya yang digunakan untuk melangsungkan aksinya adalah satu buah kaleng dan satu buah kantong plastik, kantong plastik berisikan ratusan butir pil *Carnophen* dan kaleng berisikan uang hasil penjualan pil *Carnophen*. Beberapa buah galon air minum yang disediakan oleh pengedar untuk minum para pembeli. Dan disediakan pula permen untuk menghilangkan rasa pahit bagi konsumen yang membeli ditempat. Untuk sistem delivery order pengedar menggunakan jasa kurir, kurir tersebut menggunakan kendaraan roda dua dalam menjalankan setiap aksinya mengedarkan pil *Carnophen*.

Terjadinya tindak pidana peredaran obat berbahaya (daftar G) jenis *Carnophen* di wilayah kabupaten Tuban tidak terlepas dari faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana itu sendiri. Terdapat 2 (dua) faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana peredaran obat berbahaya (daftar G) jenis *Carnophen* di wilayah kabupaten Tuban, yaitu faktor yang pertama adalah faktor penyebab dari sisi pengedar obat berbahaya (daftar G) jenis *Carnophen* dan faktor yang kedua adalah faktor penyebab dari sisi pengguna obat berbahaya (daftar G) jenis *Carnophen*.

1. Faktor Penyebab dari Sisi Pengedar Obat Berbahaya (daftar G) Jenis *Carnophen*

Ada 4 (empat) faktor penyebab dari sisi pengedar obat berbahaya (daftar G) jenis *Carnophen*, yaitu :¹²

¹² Hasil Wawancara Dengan Bapak AIPTU Mustakim Selaku Kanit Idik 2 Satresnarkoba Polres Tuban

a. Faktor Rendahnya Pemahaman Tentang Hukum

Dalam kehidupan sehari-hari tanpa sadar kita diatur dan diikat oleh beberapa norma/aturan, salah satunya adalah norma hukum. Norma hukum mempunyai sifat yang memaksa dengan sanksinya yang berupa ancaman hukuman. Norma hukum membatasi setiap manusia dalam bertingkah laku di masyarakat dengan tujuan agar terciptanya kehidupan yang aman dan tentram di masyarakat. Seperti halnya para pengedar pil *Carnophen* di wilayah kabupaten Tuban yang tidak memiliki pemahaman tentang aturan-aturan hukum, perbuatan yang dilakukan pengedar dengan mengedarkan pil *Carnophen* tanpa dilengkapi dengan izin yang resmi merupakan perbuatan yang menyimpang dari aturan hukum, hal ini sesuai dengan teori faktor anomie.

b. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor pemicu seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana, hal ini dikarenakan seseorang tersebut berada pada posisi ekonomi yang sangat lemah dan mendapatkan berbagai tuntutan hidup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dilingkungan pengedar pil *Carnophen* para pengedar tersebut tidak memiliki pekerjaan lain selain mengedarkan pil *Carnophen*. Dengan menjadikan usaha mengedarkan pil *Carnophen* adalah sebuah pekerjaan yang menjanjikan dengan mendatangkan keuntungan yang berlipat, para pengedar lebih memilih menjadi pengedar pil *Carnophen* dari pada mencari pekerjaan lain yang notabennya uang yang dihasilkan adalah uang halal.

c. Faktor Lingkungan Masyarakat

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Hasrat untuk hidup bersama merupakan pembawaan manusia merupakan suatu keharusan badaniah untuk melangsungkan kehidupan. Mulai dari manusia lahir, berkembang dan kemudian meninggal dunia didalam masyarakat. Pola pikir dan tingkahlaku seseorang dimasyarakat menunjukan identitas seseorang dimana seseorang tersebut tinggal, berkembang dan membentuk suatu kepribadian yang matang. Kepribadian seseorang akan terbentuk mengikuti pola/atau alur didalam suatu masyarakat dimana seseorang hidup dan berkembang. Kehidupan dimasyarakat tidak selalu membawa dampak positif bagi perkembangan

kepribadian seseorang, sama halnya dengan kehidupan para pengedar pil *Carnophen*. Para pengedar pil *Carnophen* tersebut tinggal disatu lingkungan yang sama yaitu lingkungan yang semua masyarakatnya bermatapencaharian sebagai pengedar pil *Carnophen*. Hal ini akan berdampak pada pola pikir dan tingkahlaku para pengedar lainnya, para pengedar akan beranggapan bahwa mengedarkan pil *Carnophen* tanpa izin resmi bukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Dan para pengedar terus mengedarkan pil *Carnophen* dan menjadikannya sebuah pekerjaan yang menjanjikan. Hal ini merupakan akibat dari pola pikir masyarakat yang salah dari pengaruh lingkungan masyarakat sekitar.

d. Faktor Pengawasan

Pihak kepolisian resort Tuban merupakan pihak yang paling bertanggung jawab terkait terjadinya tindak pidana peredaran obat berbahaya (daftar G) jenis *Carnophen* di wilayah kabupaten Tuban. Sebagai instansi yang menagani langsung tindak pidana peredaran obat berbahaya (daftar G) jenis *Carnophen* di lapangan, maka diperlukan suatu keahlian dan kecakapan khusus agar mendapatkan hasil yang maksimal dalam melakukan penanganan terkait tindak pidana peredaran obat berbahaya (daftar G) jenis *Carnophen*. Pihak kepolisian resort Tuban sudah sangat maksimal dalam melakukan upaya penanganan terkait tindak pidana peredaran obat berbahaya (daftar G) jenis *Carnophen* di wilayah kabupaten Tuban, Akan tetapi masih banyak ditemukan peredaran obat berbahaya (daftar G) *Carnophen* di wilayah kabupaten Tuban, Hal ini dikarenakan lemahnya pengawasan melekat yang dilakukan oleh pihak kepolisian secara struktural.

2. Faktor Penyebab dari Sisi Pengguna Obat Berbahaya (Daftar G) Jenis *Carnophen*.

Secara umum pengguna pil *Carnophen* berusia dari 15 tahun sampai dengan usia 30 tahun keatas, sebagian besar para pengguna pil *Carnophen* mulai menggunakan pada saat usia SMA (Sekolah Menengah Atas). Pada awalnya para pengguna pil *Carnophen* tersebut mengkonsumsi pil *Carnophen* hanya coba-coba/rasa ingin tahu akan tetapi keterusan sehingga menjadi pengguna selamanya. Sebagian besar dari para pengguna tersebut mendapatkan pil *Carnophen* dengan

cara membeli dari pengedar pil *Carnophen*, dengan rata-rata jumlah konsumsi pil *Carnophen* dua kali konsumsi dalam sehari dengan jumlah konsumsi 5-10 butir pil *Carnophen* dalam sekali konsumsi. Efek yang didapat oleh rata-rata pengguna setelah mengkonsumsi pil *Carnophen* adalah efek fly, apabila para pengguna tidak mengkonsumsi pil *Carnophen* dalam sehari saja maka pengguna tersebut akan merasa gelisah. Rata-rata pengguna menggunakan uang bulanan untuk membeli pil *Carnophen* yang dikonsumsi sehari-hari. Faktor tekanan dari kelompok/teman yang mempengaruhi rata-rata pengguna untuk tidak berhenti menggunakan pil *Carnophen*.

Adapun kendala-kendala yang muncul dalam menanggulangi tindak pidana peredaran obat berbahaya (daftar G) jenis *Carnophen*, yaitu sebagai berikut : ¹³

1. Kurangnya Bukti Untuk Dilakukan Penangkapan

Kurangnya bukti untuk dilakukan penangkapan merupakan kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam melakukan penanggulangan tindak pidana peredaran obat berbahaya (daftar G) jenis *Carnophen*. Untuk melakukan penangkapan para pengedar obat berbahaya (daftar G) jenis *Carnophen* minimal harus ada dua bukti, yaitu yang pertama para pengedar obat berbahaya (daftar G) jenis *Carnophen* benar-benar mengedarkan pil *Carnophen* tanpa memiliki izin edar, hal ini sesuai dengan pasal 197 jo pasal 98 ayat 2 undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Yang kedua adanya bukti pil *Carnophen* yang akan diedarkan atau sejumlah uang hasil dari penjualan pil *Carnophen* tersebut.

2. Kurangnya Laporan Dari Masyarakat

Kurangnya laporan dari masyarakat merupakan kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam melakukan penanggulangan tindak pidana peredaran obat berbahaya (daftar G) jenis *Carnophen*. Laporan dari masyarakat merupakan hal penting yang dibutuhkan oleh pihak kepolisian, dikarenakan laporan dari masyarakat terkait adanya peredaran obat berbahaya (daftar G) jenis *Carnophen* dapat menunjukan lokasi terjadinya peredaran obat berbahaya (daftar G) jenis *Carnophen* tersebut, sehingga pihak kepolisian

¹³ Hasil Wawancara Dengan Bapak AKP. Gatot Subagyo Selaku Kasat Resnarkoba Polres Tuban

dapat melakukan penyelidikan di lokasi yang dicurigai adanya peredaran obat berbahaya (daftar G) jenis *Carnophen*.

Adapun upaya penanggulangan dilakukan dengan dua cara yaitu upaya pencegahan dan penindakan.¹⁴

1. Upaya Pencegahan.

Upaya pencegahan merupakan upaya preventif yang dilakukan oleh pihak kepolisian resort Tuban khususnya satuan Resnarkoba polres Tuban. Upaya pencegahan terhadap peredaran obat berbahaya (daftar G) jenis *Carnophen* adalah sebagai rangkaian usaha untuk menghapuskan atau menghilangkan peredaran pil *Carnophen* dari masyarakat. Kegiatan pencegahan sebelum terjadinya peredaran pil *Carnophen* di masyarakat dilakukan dengan beberapa cara :

a. Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat.

Melaksanakan penyuluhan hukum kepada masyarakat ini berguna untuk lebih meningkatkan kesadaran hukum kepada masyarakat bahwa segala bentuk mengedarkan pil *Carnophen* tanpa memiliki izin edar itu sangat bertentangan dengan aturan hukum. Upaya penyuluhan hukum ini diberikan kepada warga masyarakat yang tinggal tepat diwilayah yang digunakan sebagai tempat transaksi peredaran pil *Carnophen*. Penyuluhan hukum ini dilakukan oleh pihak kepolisian resort Tuban bagian satresnarkoba yang bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat untuk memberikan penyuluhan mengenai pentingnya taat kepada aturan hukum. Penyuluhan hukum ini dilakukan dengan narasumber langsung dari pihak kepolisian yang berpengalaman menangani kasus peredaran obat-obatan berbahaya dan bekerja sama dengan dinas kesehatan setempat. Penyuluhan hukum ini diselenggarakan satu bulannya dua kali dan biasanya digalakan seminggu sekali. Dengan diadakannya penyuluhan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat khususnya masyarakat yang bertempat tinggal tepat diwilayah yang digunakan sebagai tempat transaksi peredaran pil *Carnophen* sehingga dapat menekan angka tingginya peredaran pil *Carnophen* di masyarakat serta memberikan wawasan

¹⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak AKP. Gatot Subagyo Selaku Kasat Resnarkoba Polres Tuban

bahwa akibat dari kejahatan yang dilakukan dapat merusak keharmonisan hubungan dalam kehidupan bermasyarakat. Pemasangan spanduk dan mengedarkan selebaran dimasyarakat termasuk salah satu cara untuk menekan angka peredaran pil *Carnophen* di masyarakat.

b. Penyuluhan Hukum Kepada Pelajar dan Mahasiswa

Penyuluhan hukum ini dilakukan di sekolah-sekolah dan dikampus-kampus yang berada diwilayah kabupaten Tuban. Hal ini dikarenakan usia remaja sangat rawan menjadi sasaran dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Penyuluhan hukum ini dilakukan oleh pihak kepolisian resort Tuban dengan bekerja sama dengan dinas kesehatan setempat. Penyuluhan hukum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang narkoba dan dampak-dampak dari penyalahgunaan narkoba agar para remaja mengerti dan memahami tentang narkoba dan dampak dari penyalahgunaan narkoba.

c. Penyuluhan Tentang Agama

Agama merupakan pedoman yang digunakan untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari, merupakan pegangan hidup setiap orang yang akan menuntun kepada jalan yang baik dan benar. Norma agama ini menunjukkan hal-hal yang dilarang dan diperbolehkan, mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga apabila manusia memahami tentang nilai-nilai agama, ia akan menjadi manusia yang baik dan benar. Mayoritas masyarakat kabupaten Tuban adalah beragama islam dan sudah dapat dipastikan akan mengetahui tentang haramnya mengedarkan pil *Carnophen* tersebut. Sehingga upaya penyuluhan mengenai nilai-nilai keagamaan ini pihak kepolisian resort Tuban bekerjasama dengan para ulama setempat untuk terus memberikan bimbingan kepada warga masyarakat khususnya masyarakat yang bertempat tinggal tepat diwilayah yang digunakan sebagai tempat transaksi peredaran pil *Carnophen* mengenai nilai-nilai keagamaan demi mencegah terjadinya kejahatan meluasnya peredaran pil *Carnophen* dimasyarakat.

2. Upaya Penindakan

Upaya penindakan merupakan upaya represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian resort Tuban khususnya satuan Resnarkoba polres Tuban. Upaya

penindakan adalah penindakan terhadap tindak pidana peredaran obat berbahaya (daftar G) jenis *Carnophen* yang dilakukan oleh pihak kepolisian resort Tuban dengan melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan penahanan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap pelaku yang mengedarkan pil *Carnophen* sampai ke sidang pengadilan sehingga memiliki putusan hukum yang tetap, adapun upaya penindakan dapat berupa¹⁵ :

a. Pengintaian dan Penyamaran

Pengintaian ini dilakukan oleh para anggota resnarkoba tempat yang diduga digunakan untuk transaksi peredaran pil *Carnophen*. Dalam melaksanakan tugasnya para anggota resnarkoba tidak menggunakan seragam atau atribut kepolisian, akan tetapi memakai pakaian biasa atau preman. Hal ini dilakukan untuk mengelabui masyarakat atau pengedar yang akan mengedarkan pil *Carnophen*, agar mereka tidak mengetahui bahwa mereka sedang diawasi dan mereka menduga bahwa pihak kepolisian yang memakai seragam dan atribut lengkap yang biasanya melakukan razia. Pengintaian dan penyamaran ini dimaksudkan untuk mencari pengedar yang mengedarkan pil *Carnophen*. Selain itu, pihak kepolisian juga menggunakan jasa informan dari masyarakat (SP). Hal ini dilakukan untuk mencari informasi dari masyarakat untuk menangkap pengedar pil *Carnophen*, dengan adanya informasi dari jasa informan (SP) anggota kepolisian dapat mengetahui dimana tempat terjadinya peredaran pil *Carnophen*. Setelah mendapatkan informasi dengan jelas dan dengan adanya bukti-bukti yang cukup, maka akan dilanjutkan ke tahap berikutnya diantaranya adalah penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan penahan.

b. Penyelidikan

Penyelidikan diatur didalam pasal 102-105 KUHP, Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Setelah mendapatkan informasi dari informan (SP) bahwa telah terjadi peredaran pil *Carnophen* atau karena dengan penyamaran tadi anggota resnarkoba Polres Tuban mengetahui sendiri telah terjadi peredaran pil *Carnophen* di masyarakat, maka akan dilanjutkan tindakan penyelidikan sesuai dengan ketentuan yang

¹⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak AIPTU Sukandar Selaku Kanit Idik 1 satresnarkoba Polres Tuban

diatur didalam KUHAP untuk dapat dilakukan tindakan ketahap yang selanjutnya.

c. Penyidikan

Penyidikan diatur didalam pasal 106-135 KUHAP. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur di dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Setelah ditentukan bahwa suatu peristiwa tersebut merupakan tindak pidana, maka pihak penyidik melakukan proses pencarian serta pengumpulan barang bukti guna membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Apabila identitas pelaku pengedar yang mengedarkan pil *Carnophen* tersebut telah diketahui maka akan dilakukan penangkapan.

d. Penangkapan

Penangkapan diatur didalam pasal 16-19 KUHAP. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengkekangan kebebasan sementara waktu tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal dan serta menurut cara yang diatur didalam undang-undang. Pihak penyidik melakukan penangkapan, apabila ada pelaporan dari masyarakat atau tertangkap tangan ada masyarakat yang mengedarkan pil *Carnophen* serta menemukan tersangka dari pelaku tersebut dengan disertai barang bukti berupa pil *Carnophen* yang diedarkan dan sejumlah uang dari hasil penjualan pil *Carnophen* maka akan diproses ketahap selanjutnya.

e. Penahan

Penahanan diatur didalam pasal 20-31 KUHAP. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Setelah melakukan penangkapan tersangka pelaku pengedar pil *Carnophen*, Pihak penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka pelaku pengedar pil *Carnophen* dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu guna kepentingan penyidikan.

f. Memberikan Pidana Pada Pelaku Pengedar Pil *Carnophen*.

Memberikan pidana berupa penderitaan yang dijatuhkan kepada pelaku pengedar pil *Carnophen* tersebut dilakukan melalui putusan Pengadilan yang dibacakan oleh ketua hakim majelis dalam sidang pengadilan terbuka. Pemberian pidana ini diberikan agar menimbulkan efek jera kepada pelaku, bahwa bagaimanapun juga mengedarkan pil *Carnophen* itu bertentangan dengan norma agama dan norma hukum yang berlaku di masyarakat.

D. Penutup.

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Penulis dapat menarik kesimpulan yang sesuai dengan maksud dan tujuan penulisan skripsi ini, yakni :

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana peredaran obat berbahaya (daftar G) jenis *Carnophen* .
 - a. Faktor Pengedar Obat Berbahaya (daftar G) Jenis *Carnophen*
 - b. Faktor Pengguna Obat Berbahaya (daftar G) jenis *Carnophen*
2. Upaya penanggulangan tindak pidana peredaran obat berbahaya (daftar G) yang dilakukan oleh pihak kepolisian resort Tuban yaitu dengan dua cara :
 - a. Upaya pencegahan
 - b. Upaya penindakan

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Untuk aparat penegak hukum khususnya pihak kepolisian resort Tuban tidak tebang pilih dalam melakukan penangkapan para pelaku pengedar obat berbahaya (daftar G) jenis *Carnophen* di wilayah kabupaten Tuban.
2. Untuk aparat penegak hukum khususnya pihak kepolisian resort Tuban untuk melakukan penyelidikan lebih mendalam terkait asal-usul dari mana obat berbahaya (daftar G) jenis *Carnophen* tersebut diproduksi.
3. Untuk aparat penegak hukum khususnya pihak Kepolisian resort Tuban untuk lebih meningkatkan program sosialisasi kepada masyarakat mengenai tindak pidana peredaran obat berbahaya (Daftar G) jenis *Carnophen*, bahaya dari penyalahgunaan obat berbahaya (Daftar G) jenis *Carnophen* dengan bekerja sama dengan dinas lain seperti dinas kesehatan yang memberi penyuluhan

mengenai bahaya dari menyalahgunakan obat-obatan, efek jangka panjang atau jangka pendek dari penyalahgunaan obat-obatan.

E. Daftar Pustaka

- Bertram G. Katzung, **Farmakologi Dasar dan Klinik**, Salemba Medika, Jakarta, 2002.
- M. Iqbal Hasan, **Metode Penelitian dan Aplikasinya**, Remaja Karya, Bandung, 1999.
- Ronny Hanitijo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum cet 4**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Soemitro, **Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.
- Soerdjono Dirjosisworo, **Kriminologi Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum.cet3**, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1986.
- Ahmad Mufid Aryono, 2013, **Polisi Sita 10.560 Butir Pil Koplo Trihek** (online), <http://www.solopos.com/>
- Hanafi, 2012, **Mengedarkan Carnophen Seorang Karyawan Ditangkap** (online) <http://seputartuban.com/>